

Penguatan Peran Dharma Wanita Persatuan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun, Cerdas dan Berintegritas

Strengthening the Role of Dharma Wanita Unity in Realizing a Polite, Intelligent and Integrity Democracy

Nina Sa'idah Fitriyah¹⁾, Yudha Praja²⁾, Muh Hamdi Zain³⁾, Siti Nur Latifa⁴⁾

^{1,3,4}Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: ninasaidah@unars.ac.id

Recived: July 25, 2026

Accepted: July 28, 2026

Published: August 04, 2026

Abstrak: Pendidikan politik merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik yang bertanggung jawab. Di era digital, tingginya arus informasi, maraknya disinformasi, serta rendahnya literasi politik menjadi tantangan yang memerlukan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk organisasi perempuan. Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan etika publik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi politik anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo melalui penguatan pemahaman mengenai demokrasi yang santun, cerdas, dan berintegritas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi) melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*), studi kasus, simulasi analisis informasi politik di media digital, serta evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test*. Sasaran kegiatan adalah anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep demokrasi yang sehat, hak dan kewajiban warga negara, pentingnya menjaga netralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, serta kemampuan mengidentifikasi informasi hoaks dan disinformasi politik. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai peran perempuan sebagai agen pendidikan politik dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Demokrasi, Dharma Wanita Persatuan, Literasi Politik, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Abstract: Political education is an important instrument in improving the quality of democracy through the formation of citizens who have knowledge, awareness, and responsible political participation. In the digital era, the high flow of information, the rise of disinformation, and low political literacy are challenges that require strengthening the capacity of the community, including women's organizations. Dharma Wanita Persatuan (DWP) as an organization consisting of the wives of the

State Civil Apparatus (ASN) has a strategic role in instilling democratic values, integrity, and public ethics in the family and community. This community service activity aims to increase the political literacy of members of Dharma Wanita of the Situbondo Regency Regional Inspectorate Association through strengthening understanding of polite, intelligent, and integrity democracy. The implementation method uses an adult education approach (andragogy) through interactive lectures, focus group discussions, case studies, simulations of political information analysis in digital media, and evaluation using pre-tests and post-tests. The target of the activity was members of the Dharma Wanita Association of Regional Inspectorates of Situbondo Regency. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the concept of healthy democracy, the rights and obligations of citizens, the importance of maintaining neutrality and ethics in public life, and the ability to identify hoax information and political disinformation. In addition, participants showed increased awareness of the role of women as agents of political education in the family and society.

Keywords: *Political Education, Democracy, Dharma Wanita Unity, Political Literacy, Community Service.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara. Keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi politik, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu instrumen strategis untuk membentuk warga negara yang memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi politik, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, etika, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan politik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi pendidikan politik guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan

etika politik masyarakat sehingga mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh informasi politik. Media digital dan media sosial memberikan kemudahan akses terhadap berbagai informasi, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Kondisi tersebut menuntut masyarakat memiliki literasi politik dan literasi digital yang memadai agar mampu menyaring informasi secara kritis, membangun sikap demokratis, serta menghindari perilaku yang dapat mengganggu persatuan dan integritas kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif ilmu politik, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus untuk membentuk budaya politik yang partisipatif. Menurut Budiardjo (2023), pendidikan politik bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong partisipasi politik yang rasional dan bertanggung jawab. Sementara itu, Almond dan Verba (1989) menjelaskan bahwa budaya politik yang demokratis hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki pengetahuan politik, rasa percaya terhadap institusi publik, dan kemauan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, perempuan memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial. Selain berperan dalam keluarga sebagai pendidik pertama bagi anak, perempuan juga memiliki kontribusi penting dalam membangun budaya demokrasi melalui organisasi kemasyarakatan. Salah satu organisasi perempuan yang memiliki jaringan luas hingga tingkat daerah adalah Dharma Wanita Persatuan (DWP). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pembinaan anggota dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan peningkatan kualitas keluarga sehingga memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan etika publik.

Di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo, anggota Dharma Wanita Persatuan merupakan mitra strategis dalam mendukung budaya kerja yang

menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Sebagai keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DWP diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga etika bermasyarakat, membangun komunikasi yang santun, serta menyebarluaskan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Penguatan literasi politik bagi anggota DWP menjadi penting agar mereka mampu memahami dinamika demokrasi secara objektif, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, masih ditemukan adanya keterbatasan pemahaman mengenai pendidikan politik, demokrasi yang berintegritas, etika bermedia sosial, serta kemampuan memilah informasi politik yang kredibel. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukatif yang mampu meningkatkan kapasitas anggota Dharma Wanita Persatuan melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif.

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Administrasi Publik FISIP dan Program Studi Manajemen FEB Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menyelenggarakan kegiatan dengan tema "Penguatan Peran Dharma Wanita Persatuan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun, Cerdas, dan Berintegritas." Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi politik peserta, memperkuat kesadaran akan pentingnya demokrasi yang beretika, serta mendorong peran aktif perempuan sebagai agen pendidikan politik di lingkungan keluarga, organisasi, dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2026 bertempat di Aula Sasono Krido Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dengan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang dipadukan dengan prinsip andragogi (*adult learning*). Pendekatan ini dipilih karena peserta merupakan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Daerah

Kabupaten Situbondo yang telah memiliki pengalaman sosial dan organisasi sehingga proses pembelajaran lebih efektif apabila dilakukan secara partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman peserta. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi, analisis kasus, refleksi, dan penyusunan solusi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan demokrasi.

Sasaran kegiatan adalah anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka melalui seminar interaktif yang mengintegrasikan ceramah, diskusi kelompok, simulasi, dan evaluasi pembelajaran. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar pendidikan politik, demokrasi yang santun dan berintegritas, etika bermedia sosial, literasi politik digital, serta peran perempuan dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dari Program Studi Administrasi Publik FISIP dan Prodi Manajemen FEB Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan tema kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan, serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Pada tahap ini tim juga menyusun modul pelatihan, bahan presentasi, instrumen evaluasi, serta studi kasus yang akan digunakan selama kegiatan.

2. Tahap Identifikasi Pengetahuan Awal (*Pre-test*)

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai pendidikan politik, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, literasi digital, serta etika bermedia sosial. Hasil *pre-test* menjadi dasar bagi tim pelaksana dalam menyesuaikan metode penyampaian materi sesuai kebutuhan peserta.

3. Tahap Edukasi dan Pendampingan

Tahap ini merupakan inti kegiatan pengabdian. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran agar peserta lebih mudah memahami konsep yang diberikan.

Metode yang digunakan meliputi:

- Ceramah interaktif, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan politik, demokrasi, integritas, dan partisipasi masyarakat.
- Diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*), untuk mendorong peserta bertukar pengalaman, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan solusi terkait praktik demokrasi.
- Studi kasus, dengan menganalisis contoh nyata mengenai penyebaran hoaks politik, ujaran kebencian, politik identitas, dan etika penggunaan media sosial.
- Simulasi, berupa latihan mengidentifikasi informasi yang valid dan informasi yang mengandung disinformasi menggunakan beberapa contoh berita yang beredar di media digital.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- *Post-test*, untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
- Observasi partisipatif, yaitu mengamati tingkat keterlibatan peserta selama diskusi dan simulasi.
- Diskusi reflektif, guna mengetahui perubahan sikap, pemahaman, dan komitmen peserta dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi yang santun dan berintegritas.

5. Tahap Tindak Lanjut

Sebagai upaya keberlanjutan program, tim pengabdian memberikan modul edukasi dan bahan presentasi kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan sebagai media pembelajaran mandiri.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pendidikan politik, demokrasi, dan literasi politik digital yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test*.
- b. Meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi informasi hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial.
- c. Tingginya tingkat partisipasi peserta selama kegiatan seminar, diskusi, dan simulasi.
- d. Tumbuhnya komitmen peserta untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi yang santun, cerdas, dan berintegritas dalam keluarga, organisasi, dan masyarakat.
- e. Terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara Program Studi Administrasi Publik FISIP dan Program Studi Manajemen FEB Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan program pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan partisipatif yang mengintegrasikan konsep pendidikan politik, literasi digital, etika demokrasi, dan pemberdayaan perempuan. Sasaran kegiatan adalah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo yang berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan karakter masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan organisasi.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep pendidikan politik, demokrasi yang berintegritas, literasi digital, serta etika bermedia sosial. Materi kemudian diperdalam melalui diskusi kelompok, studi kasus, simulasi identifikasi hoaks, dan sesi refleksi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan pengalaman dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung secara aktif dan kolaboratif.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 65,4 sebelum kegiatan menjadi 88,7 setelah kegiatan atau mengalami peningkatan sebesar 35,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pendidikan politik, demokrasi, literasi politik, dan etika bermedia sosial. Adapun hasil evaluasi pengetahuan peserta sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pengetahuan Peserta

Indikator	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Rata-rata nilai	65,4	88,7
Pemahaman demokrasi	Cukup	Sangat Baik
Literasi politik	Rendah	Baik
Literasi digital	Cukup	Baik
Etika bermedia sosial	Cukup	Sangat Baik

Peningkatan pengetahuan peserta menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai sistem demokrasi, tetapi juga membentuk kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ini sejalan dengan pendapat Budiardjo (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berpartisipasi secara rasional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan sikap peserta. Selama proses diskusi dan simulasi, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghargai perbedaan pandangan politik, serta menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Perubahan sikap tersebut menunjukkan bahwa

pendidikan politik yang dipadukan dengan literasi digital mampu membentuk perilaku demokratis yang lebih bijaksana.

Perubahan perilaku tersebut sejalan dengan konsep budaya politik partisipatif yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1989). Mereka menjelaskan bahwa masyarakat demokratis tidak hanya ditandai oleh tingginya partisipasi politik, tetapi juga oleh adanya pengetahuan politik, kepercayaan terhadap institusi publik, kemampuan berdialog, dan sikap saling menghargai dalam menyikapi perbedaan. Dengan demikian, pendidikan politik tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya demokrasi yang lebih matang.

Materi mengenai literasi digital menjadi salah satu sesi yang memperoleh respons paling positif dari peserta. Tingginya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Melalui simulasi identifikasi informasi, peserta dilatih untuk memverifikasi sumber berita, mengenali karakteristik informasi yang menyesatkan, serta memahami etika dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Hasil ini memperkuat pandangan UNESCO (2021) bahwa literasi media dan informasi merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki warga negara agar mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara tepat, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat peran perempuan sebagai agen pendidikan politik. Sebagai organisasi yang beranggotakan istri Aparatur Sipil Negara (ASN), Dharma Wanita Persatuan memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, toleransi, dan etika kepada anggota keluarga maupun masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta semakin memahami pentingnya peran perempuan dalam membangun budaya politik yang sehat melalui pendidikan keluarga, keteladanan, dan partisipasi sosial. Temuan ini mendukung pandangan Putnam (1993) bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jejaring sosial, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama bagi terciptanya demokrasi yang berkualitas.

Selain memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik individu peserta, kegiatan pengabdian ini juga memberikan manfaat bagi organisasi mitra. Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo memperoleh modul pendidikan politik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan dalam mendukung program peningkatan kapasitas anggota. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi perempuan dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan politik, literasi digital, serta penguatan nilai-nilai demokrasi yang berintegritas. Proses penyampaian materi berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang melibatkan partisipasi aktif seluruh peserta. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Penyampaian Materi dan



Gambar 2. Foto bersama Anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya tercermin pada luaran yang dihasilkan. Berbagai luaran tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan program pendidikan politik yang inklusif serta mendukung penguatan kapasitas perempuan dalam kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Rincian capaian luaran kegiatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luaran Kegiatan Pengabdian

Luaran	Capaian
Modul Pendidikan Politik	Tersusun
Peningkatan Literasi Politik	Meningkat
Peningkatan Literasi Digital	Meningkat
Model Edukasi Partisipatif	Terimplementasi
Kerja Sama Perguruan Tinggi–Mitra	Terjalin

Capaian luaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 menginformasi bahwa seluruh target kegiatan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kapasitas anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dalam bidang pendidikan politik, memperkuat literasi digital, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya demokrasi yang santun, cerdas dan berintegritas. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi perempuan merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan pendidikan politik berbasis masyarakat. Selain memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal, kolaborasi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan, sebagai agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, etika bermedia digital, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang efektif dalam meningkatkan literasi politik dan literasi digital anggota Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh bertambahnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemampuan mengenali hoaks politik, serta meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara santun, cerdas, dan berintegritas.
2. Luaran kegiatan berupa modul pendidikan politik dan model edukasi partisipatif berhasil disusun dan diimplementasikan sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Luaran ini memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi perempuan yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan politik dan penguatan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat.
3. Sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi mitra terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan politik perempuan. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengembangan materi yang mencakup kepemimpinan perempuan, etika publik, pengawasan partisipatif, dan literasi digital sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo beserta seluruh anggota yang telah memberikan izin dan partisipasi dalam kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Sage Publications.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu.

- Budiardjo, M. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Pendidikan Pilih Berkelanjutan*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literate Citizens: Think Critically, Click Wisely*. UNESCO.
- Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 4(13), 35–42.